

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024



DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PANGKALPINANG

TAHUN 2023

Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2023**

**PANGKALPINANG
TAHUN 2023**



Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang tertuang dalam satu sistem perencanaan pembangunan nasional, merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Disamping itu dalam peraturan tersebut juga mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penjabaran RPJMD dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang akan dijadikan pedoman Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah selama satu tahun anggaran.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada pasal 27 ayat 1 mengamanatkan bahwa PD menyusun Renja-SKPD yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

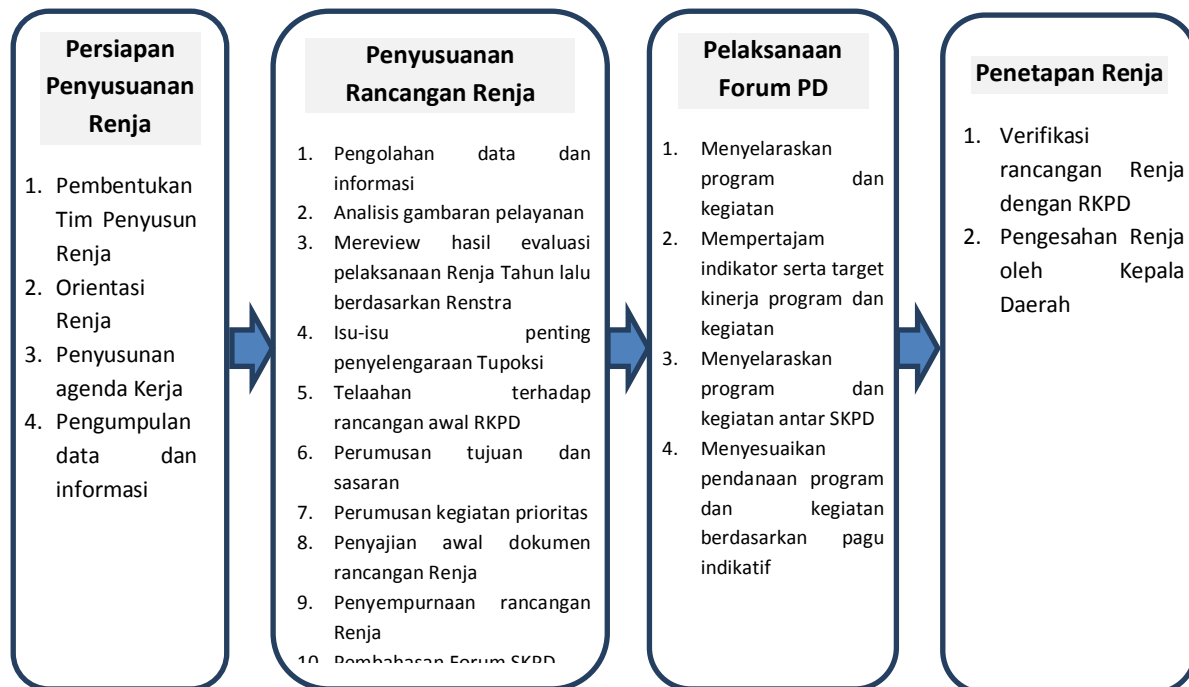
Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan untuk satu tahun anggaran yang disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil

Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya serta prediksi masalah yang akan dihadapi. Selain itu Renja ini juga memuat kebijakan, program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran dalam pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan usaha kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi bahan utama RKPD serta prakiraan anggaran yang dibutuhkan. Seluruh kebijakan tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dimulai dengan tahap persiapan yang meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Kemudian proses selanjutnya adalah penyusunan rancangan Renja dengan melalui dua tahap yaitu perumusan rancangan Renja dan penyajian rancangan Renja, setelah kedua tahapan tersebut dilaksanakan forum Perangkat Daerah sebagai sarana untuk memfasilitasi penyampaian usulan baik dari Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota maupun pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan rancangan kebijakan yang akan diakomodir ke dalam Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setelah keseluruhan proses tersebut dilaksanakan, Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara kolektif dilakukan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan. Berikut ini disajikan bagan tahapan penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024.

Gambar 1.1.
Tahapan Penyusunan Renja



1.2. Landasan Hukum

Dasar dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4426);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 73 Seri F).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disusun dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

1. Sebagai bagian dari perencanaan strategis yang merupakan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun anggaran program dan kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disusun mengacu pada sistematika yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan daftar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Bab ini memuat komplikasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun n-2 sampai dengan triwulan IV Tahun 2023.

BAB III Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah untuk Tahun 2024 dan dukungan strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan Daerah dan Kebijakan Nasional.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan tentang kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB V Penutup

Bab ini memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2023 (n-1) merupakan tahun berjalan dengan tahun pembuatan rencana kerja tahun 2024 (n), sehingga realisasi capaian target Renja masih belum ada. Evaluasi realisasi capaian target Renja ini juga melihat secara akumulatif dari tahun awal Renstra Perangkat Daerah (n-1 dan n-2), untuk mengetahui tingkat keberhasilan realisasi target kinerja dari program dan kegiatan kerja yang telah direncanakan; Sehingga Perangkat daerah dapat mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan sebaliknya, selain itu juga dapat mengetahui program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang tepat untuk mengatasinya.

Secara umum capaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik tahun 2022 berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan walaupun terjadi rasionalisasi anggaran pada beberapa kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2022 urusan Koperasi dan UKM melaksanakan 7 (tujuh) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub kegiatan dengan total alokasi anggaran belanja langsung pada APBD induk sebesar APBD induk sebesar Rp 14.711.072.921 dan pada APBD Perubahan menjadi Rp 22.312.405.660,- (penambahan sebesar Rp 7.601.332.739,-). Realisasi serapan anggaran belanja langsung sebesar 8.578.008.830 atau 63,29 % dengan sisa anggaran sebesar Rp 4.975.637.821 atau 36,71%. Alokasi belanja tidak langsung pada APBD induk sebesar Rp 7.991.649.738 dan pada APBD perubahan menjadi Rp 8.758.759.009,- (mengalami penambahan sebesar Rp 767.109.271,-) dengan realisasi sebesar Rp 7.946.048.521,- atau 90,72% dengan sisa anggaran Rp 812.710.488,- atau

9,28%. Untuk pendapatan asli daerah, target anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp170.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 62.100.000 atau 36,53%.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar Rp.8.578.008.830,- atau 63,29 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama (urusan/bidang) sebesar 92,32 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung (rutin) sebesar 98.80 %.Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat DaerahDinas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
1	2						3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	1	7	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	160	23,130,080,9 92	80	11,245,348,2 44	80	11,762,079,61 3	20	10,839,100,3 08	25	92.15%		16,368,222,7 37
							Survei Kepuasan Pelayanan Internal		90		0.9		90		22		24			
	2	1	7	1	1		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	26	116,349,460	15	37,561,900.0 0	13 Do k	44,397,000	-	44,371,813		99.94%		81,933,713
	2	1	7	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6	63,063,104	3	30,469,000.0 0	3 Do k	44,397,000	7	44,371,813		99.94%		74,840,813
	2	1	7	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20	53,286,356	12	7,092,900.00	10 Do k	-	6	Rp -				-
																				-

No	Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
1	2					3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	1	7	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan PD tepat waktu	4 Lap	16,733,779,4 76	2	7,552,749,74 4.00	2 La p	8,758,759,009	-	7,946,048,52 1		90.72%		15,498,798,2 65
	2	1	7	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16,733,779,4 76		7,552,749,74 4.00		8,758,759,009		7,946,048,52 1		90.72%		15,498,798,2 65
																			-
	2	1	7	1	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang meningkat Pengetahuannya	8 Oran g	55,060,000	8	53,038,700.0 0	4 ora ng	39,299,000	-	39,116,735		99.54%		92,155,435
	2	1	7	1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			110,120,000		53,038,700.0 0		39,299,000		39,116,735		99.54%		92,155,435
																			-
	2	1	7	1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum PD	16 Keg	1,846,383,07 0	8	917,506,900. 00	8 ke g	763,524,547	-	763,024,392		99.93%		1,680,531,29 2
	2	1	7	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			89,971,022		44,961,000.0 0		47,169,994		47,166,100		99.99%		92,127,100
	2	1	7	1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			52,844,000		26,264,000.0 0		26,411,256		26,307,400		99.61%		52,571,400
	2	1	7	1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			257,835,588		124,738,500. 00		102,415,638		102,415,200		100.00%		227,153,700

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
1	2					3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	1	1	1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			40,800,000		19,800,000.0 0		14,390,000		14,340,000		99.65%		34,140,000
	2	1	1	1	7	Penyediaan Bahan/Material			355,718,460		177,667,200. 00		176,848,659		176,661,938		99.89%		354,329,138
	2	1	1	1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu			139,250,000		41,580,000.0 0		41,580,000		41,575,300		99.99%		83,155,300
	2	1	1	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			909,964,000		454,546,200. 00		354,709,000		354,558,454		99.96%		809,104,654
																			-
	2	1	1	1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16 buah	1,433,905,96 0	8	648,900,000. 00	8 buah	68,441,757	-	31,372,000		45.84%		680,272,000
	2	1	1	1	5	Pengadaan Mebel					0				Rp -		-		
	2	1	1	1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1,433,905,96 0		648,900,000. 00		68,441,757		31,372,000		45.84%		680,272,000
																			-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
1	2					3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	1	1	1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	8 jenis	3,633,189,00 0	4	1,761,628,80 0.00	4 jen is	1,768,883,300		1,713,226,84 7		96.85%		3,474,855,64 7
	2	1	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			59,589,000		22,209,000.0 0		19,285,000		13,032,000		67.58%		35,241,000
	2	1	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			545,600,000		225,682,800. 00		247,198,300		215,200,847		87.06%		440,883,647
	2	1	1	1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12,000,000		5,737,000.00		6,000,000		5,994,000		99.90%		11,731,000
	2	1	1	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3,016,000,00 0		1,508,000,00 0.00		1,496,400,000		1,479,000,00 0		98.84%		2,987,000,00 0
																			-
	2	1	1	1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis BMD yang dipelihara	6 jenis	565,264,796	3	273,962,200. 00	3 jen is	318,775,000		301,940,000		94.72%		575,902,200
	2	1	1	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			255,480,000		119,222,100. 00		127,740,000		119,639,000		93.66%		238,861,100

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
1	2					3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	1	1	1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			200,000,000		99,977,000.00		138,195,000		129,480,000		93.69%		229,457,000
	2	1	1	1	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			109,784,796		54,763,100.00		52,840,000		52,821,000		99.96%		107,584,100
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																25	96.95%		
Predikat Kinerja																T			
	2	1	3			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi	1.26	271,397,384	0.22	115,475,300.00	0.63	34,359,681	0.065	32,856,600	1032	95.63%		Rp115,475,300
	2	1	3	1		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diawasi	14 koperasi	271,397,384	19	115,475,300.00	7 Koperasi	34,359,681	0	32,856,600		95.63%		Rp115,475,300

No	Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
1	2					3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	1	3	1	2	Peningkatan Ketaatan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel		271,397,384		115,475,300.00		34,359,681		32,856,600		95.63%		Rp115,475,300
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																103.2	95.63%		
Predikat Kinerja																T			Rp-
	2	1	4			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang sehat		279,629,198	0.01	135,877,600.00	0.45	96,173,098	0.062	86,742,200	13.78	90.19%		Rp160,033,100
	2	1	4	1		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah	Jumlah Koperasi yang dinilai Keahatannya	10 Koperasi	279,629,198	7	135,877,600.00	5 Koperasi	96,173,098	-	86,742,200		90.19%		Rp160,033,100
							Jumlah Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi	6 koperasi		3		3 Koperasi		-					

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
1	2						3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tokoh Penggerak Koperasi Tingkat Provinsi	2 tokoh		1		2 To ko h		-					
	2	1 7	4	1	1		Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi			32,331,500.0 0		29,359,800		28,935,000		98.55%		Rp33,426,50 0	
	2	1 7	4	1	2		Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan			103,546,100. 00		66,813,298		57,807,200		86.52%		Rp126,606,6 00	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																13 .7 8	90.19%			
Predikat Kinerja																	SR		Rp -	
	2	1 7	5				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM KUKM yang bersertifikat		2,422,470,12 6	1	2,296,720,30 0.00	90	Rp2,469,963,9 75	0.95	2,357,174,75 2	1. 06	95.43%	1 .0 6	Rp2,817,817 ,660

No	Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
1	2					3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	1	5	1		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Peserta pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kab/kota dalam 1 provinsi		4,844,940,25 2	909	2,296,720,30 0.00	74 0 ora ng	2,469,963,975	0	2,357,174,75 2		95.43%		Rp2,817,817 ,660
							Jumlah sertifikasi penerapan manajemen mutu ISO			1		1 ser tifika t		0					
	2	1	5	1	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				2,296,720,30 0.00		2,469,963,975		2,357,174,75 2		95.43%		Rp2,817,817 ,660
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																1. 06	95.43%		
Predikat Kinerja																	T		Rp -
	2	1	6			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang diberdayakan		397,427,232	0.03	259,659,600. 00	1.4 4	Rp151,428,31 6	0.07	133,286,300	4. 86	88.02%		Rp285,191,8 00

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
1	2					3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	1	7	6	1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah PPKL yang diberdayakan	40 PPKL	794,854,464	28	259,659,600	28 PP KL	151,428,316	-	133,286,300		88.02%	Rp285,191,8 00	
Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi							30 koper asi		65	20 ko per asi									
Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pembiayaan/Kemitra an/sarana prasarana							10 Koper asi		33	5 ko per asi	0								
	2	1	7	6	1	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		259,659,600		151,428,316		133,286,300		88.02%	Rp285,191,8 00		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																4. 86	88.02%		
Predikat Kinerja																	SR		Rp -

No	Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
1	2					3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	1	7	7		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang diberdayakan	0.25	1,736,420,00 0	0	757,319,800. 00	0.2 5	Rp1,653,027,7 94	0.03	630,592,410	12	38.15%		Rp923,239,8 00
	2	1	7	7	1	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pemuktahiran Pendataan	1 lapor an	1,736,420,00 0	1	757,319,800. 00	1 lap ora n	1,653,027,794		630,592,410		38.15%		Rp923,239,8 00
					Jumlah UMKM yang bermitraan		5 UMK M		25		5 U MK M								
					Jumlah IUMK yang diterbit		600 IUMK		17,6 82		60 0 IU MK								
					Jumlah UMKM yang menguat Kelembagaan		90 Unit		127		90 Uni t								
					Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan		11 Kali		42		11 Kal i								

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
1	2					3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	1	7	1	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				757,319,800.00		1,653,027,794		630,592,410		38.15%		Rp923,239,800
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																12	38.15%		
Predikat Kinerja																	SR		
	2	1	7	8		Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Kecil yang dikembangkan usahanya	0.66	2,908,919,056	0.66	1,397,323,000.00	0.66	6,145,553,447	0.05	2,444,304,781	7.58	39.77%		Rp1,457,816,100
	2	1	7	8	1	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan	30 unit	2,908,919,056	30 unit	1,397,323,000.00	30 unit	6,145,553,447	0	2,444,304,781		39.77%		Rp1,457,816,100

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
1	2						3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	10 unit		15 unit		10 uni t		30					
						Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi akses pembiayaan		200 unit		200 unit		20 0 uni t	0							
	2	1	7	8	1	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi			1,397,323,000		6,145,553,447		2,444,304,78 1		39.77%		Rp1,457,816 ,100	
									31,146,343,9 88		16,207,723,8 44		22,312,585,92 4		16,524,057,3 51		10 .6 6	39.77%		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		74.06%		
Predikat Kinerja																		T		

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan UKM s/d Tahun 2022, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Program/kegiatan yang capaian kinerjanya rendah adalah

a) Program Pemberdayaan UMKM;

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.653.027.794,- dengan realisasi sebesar Rp.1.022.435.384,- atau 38,15 %.

b) Program Pengembangan UMKM;

Dengan pagu anggaran sebesar Rp.6.145.553.447,-dengan realisasi sebesar Rp. 2.444.304.781atau 39,77 %.

2. Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Secara keseluruhan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terlaksana, dengan total anggaran belanja pada tahun 2022 sebesar Rp. 22.312.405.660,- yang terdiri dari belanja pegawai, belanja operasi dan belanja Modal, terealisasi sebesar Rp. 16.524.057.351,- atau sebesar 74,06 %.

3. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

Program Pemberdayaan UMKM dan Program Pengembangan UMKM yang realisasinya rendah yaitu sebesar 38,15 % dan 39,77 % karena adanya tambahan anggaran melalui dana DID (Dana Insentif daerah) sesuai dengan PMK No 170/PMK/2022 tentang Dana insentif Daerah dengan peruntukan tambahan Program Pemberdayaan UMKM sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan Program Pengembangan sebesar Rp. 5.627.000.000,-. Anggaran DID ini tidak terserap secara maksimal karena turunnya anggaran ini di triwulan 4 tahun 2022 atau bulan November 2022, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak maksimal karena waktunya singkat dan berdampak pada penyerapan anggaran tidak maksimal.

4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab, yaitu

Dalam upaya untuk meminimalisir realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam program/kegiatan, maka di butuhkan upaya sebagai berikut:

- a) Penetapan target berupa output kegiatan disesuaikan dengan kemampuan anggaran agar target dapat tercapai;
- b) Pelaksanaan program/kegiatan agar tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga realisasi target dan anggaran dapat tercapai dan selaras dengan yang ditetapkan dalam DPPPA;
- c) Pengesahan DPPA diharapkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan lebih cepat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

A. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyenggarakan Tupoksi Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi pelayanan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta *Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024*

hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud, dapat diidentifikasi permasalahan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya upaya pengembangan volume usaha baik koperasi maupun UMKM;
- b. Terbatasnya kemampuan wirausaha SDM Koperasi dan UMKM;
- c. Terbatasnya jaringan usaha baik UMKM maupun koperasi;
- d. Rendahnya kemampuan KUMKM dalam mengakses sumber permodalan;
- e. Belum optimalnya kemampuan desain *packaging*;
- f. Terbatasnya pemasaran produk KUMKM;
- g. Keterbatasan dana pembinaan dan pengembangan KUMKM pada kabupaten/kota sehingga sinergitas pembinaan dan pengembangan KUMKM yg dilakukan Perangkat Daerah Provinsi kurang maksimal;
- h. Terbatasnya calon eksportir dan promosi/misi dagang ke luar negeri mengenai produk unggulan daerah;
- i. Organisasi PKL belum teroganisir secara formal;
- j. Belum adanya gedung pemasaran produk Koperasi dan UMKM yang representatif;
- k. Belum tersedia dan terkelolanya data dan informasi mengenai KUMKM yang akurat untuk mendukung proses pembinaan dan pengembangan;
- l. Belum optimalnya tata kelola koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

A. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

Tantangan (*treats*) dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Persaingan yang semakin ketat bagi pelaku usaha (UMKM) dan Koperasi dengan masuknya produk-produk dari pasar global dengan harga dan kualitas yang kompetitif.
- b. Produk Koperasi dan UMKM, sebagian belum memenuhi standar mutu baik nasional maupun internasional.
- c. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang cenderung fluktuatif.

- d. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
 - e. Rendahnya kapasitas SDM KUMKM.
2. Peluang
- Peluang-peluang dalam meningkatkan pelayanan PD sebagai berikut :
- a. Pasar dalam dan luar negeri yang terbuka bagi produk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah.
 - b. Tersedianya akses Informasi dan teknologi
 - c. Geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Strategis.
 - d. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Destinasi Wisata Nasional.
 - e. Mayoritas pelaku usaha adalah Usaha Mikro,Kecil dan Menengah.

B. Formulasi isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Sampai saat ini secara ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mengandalkan sektor pertambangan dan sektor pertanian, sekitar 80% ekspor dikuasai oleh komoditas Timah, dan sekitar 20% dari komoditas pertanian. Dengan kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Provinsi Bangka Belitung kurang baik sehingga Pemerintah daerah berupaya melakukan transformasi ekonomi dari komoditas timah ke pertanian, perikanan, pariwisata dan perdagangan. Transformasi ini berjalan sangat lambat, karena sejauh ini baru Kabupaten Belitung yang berhasil mengangkat sector pariwisata menjadi sector unggulan mereka, dimana promosi pariwisata Kabupaten Belitung sudah diakui secara Nasional melalui KEK Tanjung Kelayang dan secara internasional melalui geopark Belitung yang diakui oleh UNESCO. Keberhasilan Kabupaten Belitung belum diikuti oleh Kabupaten lainnya, walaupun masing-masing Kabupaten sudah menunjukkan sector-sektor unggulan yang akan mereka angkat sebagai ujung tombak peningkatan pendapatan daerah, seperti Kabupaten Bangka Selatan yang mengangkat sector pertanian melalui pengembangan komoditas lada (*pepper*), yang pada masa dulu sempat menjadi komoditas unggulan dan dikenal dunia dengan *Muntok white pepper*. Namun karena kurangnya pengembangan produk dan distribution cains yang sulit diatasi menyebabkan komoditas ini sulit bersaing dengan pasar di dunia, yang pada masa sekarang sudah memiliki banyak saingan dari negara penghasil lada seperti Vietnam.Selain mengangkat sector unggulan, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu solusi yang bagus dalam melaksanakan transformasi ekonomi, karena dengan pengembangan sector UKM dapat

Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Peluang untuk pengembangan UKM sangat besar, karena secara kebijakan pemerintah pusat dan daerah sangat mendukung dengan memberi kemudahan dalam perijinan, memberikan banyak kesempatan untuk peningkatan skill dan ketrampilan melalui pelatihan UKM, memberikan kemudahan permodalan melalui KUR, memberikan bantuan peralatan dan prasarana bagi Usaha kecil dan dalam hal pemasaran pemerintah juga memberikan kemudahan melalui promosi atau pameran.

Potensi lainnya berupa pelaku ekonomi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah yang relatif bertambah setiap tahunnya namun belum tertangani secara optimal. Terutama sektor informal. Sektor informal merupakan potensi ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi apabila berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi, Kreatif, Inovatif serta dapat menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan.

Isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Masih belum optimalnya kontribusi Sektor koperasi dan UKM dalam perluasan kesempatan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Isu strategis ini kami tentukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2022 dan berdasarkan isu nasional dimana tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan yang cenderung meningkat pada dua tahun terakhir pada saat pandemic Covid-19 merebak. Dari isu strategis ini kami mencoba menjabarkan permasalahan yang dihadapi khususnya pada sector koperasi dan UKM antara lain:

- a. Belum optimalnya upaya pengembangan volume usaha baik koperasi maupun UKM;
- b. Masih rendahnya kemampuan SDM Koperasi dan UKM;
- c. Minimnya jaringan usaha baik UKM maupun koperasi;
- d. Belum optimalnya fasilitasi akses sumber permodalan bagi Koperasi dan UKM;
- e. Belum standarnya desain *packaging* produk KUKM;
- f. Masih terbatasnya fasilitasi pemasaran produk KUKM;
- g. Belum terjalin sinergitas pembinaan dan pengembangan KUKM dengan OPD pada kabupaten/kota;
- h. Masih kurangnya pembinaan terhadap calon eksportir dan pelaku promosi/misi dagang ke luar negeri mengenai produk unggulan daerah;
- i. Masih rendahnya akses anggota koperasi dan UKM terhadap perbankan;

- j. Belum adanya gedung pemasaran produk Koperasi dan UMKM yang representatif;
- k. Lemahnya pengawasan terhadap koperasi yang ada, sehingga jumlah koperasi yang tidak aktif relatif banyak;
- l. Belum optimalnya tata kelola koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Koperasi dan UKM dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai urusan Dinas Koperasi dan UKM.

Rancangan awal RKPD yang telah disusun merupakan kompilasi dari usulan program dan kegiatan dari seluruh perangkat daerah dengan mendasarkan pada Kepmendagri Nomor Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah dan program kegiatan tahun yang lalu. Sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam pada Renja Dinas Koperasi dan UKM dan dengan melakukan sinkronisasi terhadap urusan terkait, isu-isu lingkungan yang baru serta kinerja kegiatan yang belum tercapai pada Renstra sebelumnya. Reviu dari hasil analisis dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Secara lengkap reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel.2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM

No.	RKPD				RENJA 2024				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Kebutuhan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip PD	81	13,633,250,262	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Sakip PD	80,50%	13.633.250.262	DKUKM
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DKUKM)	84			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal			DKUKM
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD BALATKOP)	80,5						DKUKM
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	95,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	95.000.000	DKUKM
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	70,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	70.000.000	DKUKM
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	6 Laporan	25,000,000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	6 Laporan	25.000.000	DKUKM
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8,531,839,409	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	4 Dokumen	8.531.839.409	DKUKM
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bulan	8,531,839,409	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	53 Orang/Bulan	8.531.839.409	DKUKM

Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

No.	RKPD				RENJA 2024				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Kebutuhan	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	187,000,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	4 Dokumen	187.000.000	DKUKM
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	95 Paket	57,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	95 Paket	57.000.000	DKUKM
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	130,000,000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	130.000.000	DKUKM
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1,050,683,200	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	1 Paket	1.050.683.200	DKUKM
	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.000.000	DKUKM
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	135,164,300	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	135.164.300	DKUKM
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	34,999,500	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.999.500	DKUKM
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	137,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	137.000.000	DKUKM
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	13,620,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	13.620.000	DKUKM

Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

No.	RKPD				RENJA 2024				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Kebutuhan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	99,999,400	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Tahun	99.999.400	DKUKM
	Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	71,500,000	Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	71.500.000	DKUKM
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	453,400,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	453.400.000	DKUKM
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	DKUKM
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1,210,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Tersedia	1 Paket	1.210.000.000	DKUKM
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	57,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	57.000.000	DKUKM
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	273,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	273.000.000	DKUKM
	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	880,000,000	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	880.000.000	DKUKM
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1,830,516,125	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang yang Tersedia	12 Laporan	1.830.516.125	DKUKM
									DKUKM
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	23,285,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	23.285.000	DKUKM

Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

No.	RKPD				RENJA 2024				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Kebutuhan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	329,931,125	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	329.931.125	DKUKM
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.000.000	DKUKM
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,470,300,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.470.300.000	DKUKM
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	-	-	728,211,528	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Tersedia	5 Laporan	728.211.528	DKUKM
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	65,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	65.000.000	DKUKM
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	107,780,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	107.780.000	DKUKM
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	409,431,528	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	409.431.528	DKUKM
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	130,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	130.000.000	DKUKM

Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

No.	RKPD				RENJA 2024				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Kebutuhan	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	16,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	16.000.000	DKUKM
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-	60,000,000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam yang difasilitasi	2 Persen	60.000.000	DKUKM
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	60,000,000	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang difasilitasi	2 Ijin Usaha	60.000.000	DKUKM
	Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten /Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	2 Unit Usaha	60,000,000	Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	2 Unit Usaha	60.000.000	DKUKM
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-	135,000,000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	20 Persen	135.000.000	DKUKM
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	110,000,000	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang di periksa dan diawasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20 Koperasi	110.000.000	DKUKM

No.	RKPD				RENJA 2024				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Kebutuhan	
	Sub Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	20 Dokumen	35,000,000	Sub Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	20 Dokumen	35.000.000	DKUKM
	Sub Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20 Unit Usaha	75,000,000	Sub Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20 Unit Usaha	75.000.000	DKUKM
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	25,000,000	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang di periksa dan diawasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	13 Koperasi	25.000.000	DKUKM
	Sub Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	13 Koperasi	25,000,000	Sub Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	13 Koperasi	25.000.000	DKUKM
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	90,000,000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Kesehatan KSP/USP yang dinilai	10%	90.000.000	DKUKM

Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

No.	RKPD				RENJA 2024				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Kebutuhan	
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	90,000,000	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10 Koperasi	90.000.000	DKUKM
	Sub Kegiatan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	10 Unit Usaha	25,000,000	Sub Kegiatan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	10 Unit Usaha	25.000.000	DKUKM
	Sub Kegiatan Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	3 Unit Usaha	65,000,000	Sub Kegiatan Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	3 Unit Usaha	65.000.000	DKUKM
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN (DKUKM)	-	-	3,824,212,800	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi, UKM yang terlatih	100%	3.824.212.800	DKUKM
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	75,000,000	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang terlatih	50 Orang	75.000.000	DKUKM
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	90 Orang	75,000,000	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	90 Orang	75.000.000	DKUKM

No.	RKPD				RENJA 2024				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Kebutuhan	
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	3,749,212,800	Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM UKM yang terlatih	200 Orang	3.749.212.800	DKUKM
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	-	450 Orang	3,749,212,800	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM UKM yang meningkat Pengetahuan kapasitas dan kompetensi	450 Orang	3.749.212.800	DKUKM
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-	1,312,239,600	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberdayakan	5%	1.312.239.600	DKUKM
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1,312,239,600	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Koperasi	1.312.239.600	DKUKM
	Sub Kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	5 Unit Usaha	200,000,000	Sub Kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	5 Unit Usaha	200.000.000	DKUKM
	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	5 Unit Usaha	1,042,239,600	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	5 Unit Usaha	1.042.239.600	DKUKM

Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

No.	RKPD				RENJA 2024				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Kebutuhan	
	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	5 Keluarga	70,000,000	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	5 Keluarga	70.000.000	DKUKM
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	2,379,622,100	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	0,47%	2.379.622.100	DKUKM
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	2,379,622,100	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pemutakhiran data dan penguatan kelembagaan UMKM	1 Dokumen	2.379.622.100	DKUKM
	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	180184 Unit Usaha	619,443,000	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	180184 Unit Usaha	619.443.000	DKUKM
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	840 Orang	1,760,179,100	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	840 Orang	1.760.179.100	DKUKM

No.	RKPD				RENJA 2024				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif 2024	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Kebutuhan	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-	2,198,727,100	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Kecil Yang Meningkatkan Menjadi Usaha Menengah	0,10%	2.198.727.100	DKUKM
	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	-	-	2,198,727,100	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah	3 Unit Usaha	2.198.727.100	DKUKM
	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	420 Unit Usaha	1,881,584,200	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	420 Unit Usaha	1.881.584.200	DKUKM
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	140 Orang	317,142,900	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	140 Orang	317.142.900	DKUKM

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan melalui Pokir dan Usulan Masyarakat

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari hasil penelitian lapangan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM. Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum PD. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sarana prasarana infrastruktur yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi dan UKM dalam Renja tahun 2022, namun sebagian belum dapat terakomodir karena ketidaksesuaian usulan masyarakat dengan kondisi di lapangan, bukan menjadi skala prioritas, dan keterbatasan anggaran. Perencanaan kegiatan pada Dinas Koperasi dan UKM, mendasar pada :

- a. Program dinas berdasar data teknis yang ada pada dinas;
- b. Usulan masyarakat langsung;
- c. Usulan melalui musrenbang

Dari sekian banyak usulan terutama usulan dari musrenbang tidak semua dapat terakomodir dalam kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM. Skala prioritas yang dapat diusulkan pada kegiatan Dinas Koperasi dan UKM adalah yang menyangkut kerusakan yang dampaknya dapat membahayakan bagi keselamatan masyarakat. Usulan program dan kegiatan masyarakat yang terkait dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan disajikan dalam tabel 2.4 dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan melalui POKIR DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2024

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL
58	20-01-2023	ADET, SH., MH	Butuh banyak pendampingan oleh konsultan Plut KUKM terhadap UMKM yang sebarannya tidak merata antara di desa dan kota	Kurangnya pelatihan	Koperasi Wanita Flamboyan Desa Sungkap Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
313	26-01-2023	HERYAWANDI, SE	Butuh banyak pendampingan oleh konsultan Plut KUKM terhadap UMKM yang sebarannya tidak merata antara di desa dan kota	Mengajukan Lahan Khusus di Desa Tempilang untuk UMKM yang peruntukkannya dikhususkan untuk Wisata kuliner Desa Tempilang	Desa Tempilang, Provinsi Bangka Belitung	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
349	26-01-2023	ADET, SH., MH	Butuh banyak pendampingan oleh konsultan Plut KUKM terhadap UMKM yang sebarannya tidak merata antara di desa dan kota	Kurangnya pelatihan	Koperasi Wanita Flamboyan Desa Sungkap Kecamatan Simpang Katis, Provinsi Bangka Belitung	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
440	27-01-2023	NATA SUMITRA	Butuh banyak pendampingan oleh konsultan Plut KUKM terhadap UMKM yang sebarannya tidak merata antara di desa dan kota	Belum berkembangnya produksi Dodol Nanas Kelompok Usaha Bersama Amnas Berehun dan belum adanya tempat produksi yang permanen	Desa Aik Madu RT 1 RW 1 Desa Air Madu Kecamatan Simpang Reggiang , Provinsi Bangka Belitung	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL
446	27-01-2023	MANSAH	Terbatasnya Akses Permodalan Untuk Koperasi	Dimohon untuk pembentukan Koperasi Bangka Belitung dalam upaya menstabilkan perekonomian masyarakat dan sebagai wadah untuk melihat bagaimana monopoli perekonomian yang terjadi	Desa Mancung, Provinsi Bangka Belitung	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
485	27-01-2023	DODY KUSDIAN, ST., MH	Butuh banyak pendampingan oleh konsultan Plut KUKM terhadap UMKM yang sebarannya tidak merata antara di desa dan kota	Kurangnya informasi proses masuk ke PT Jamkrida milik Pemerintah Provinsi agar bisa ada jaminan bantuan untuk UMKM	Jl. Sumedang Kel. Kejaksaan Kec. Tamansari, Provinsi Bangka Belitung	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
540	30-01-2023	Drs. H. ERWANDI A. RANI	Belum semua UKM dapat mengakses permodalan	Masih banyaknya para pelalu UMKM butuh bantuan modal dalam pengembangan produksi produk olahan UMKM nya	Kecamatan Sijuk Kab. Belitung, Provinsi Bangka Belitung	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
587	31-01-2023	BELIADI, S.IP	Terbatasnya akses pengembangan usaha	PERLUNYA BANTUAN UMKM TERHADAP USAHA RUMAHAN YANG IA RINTIS, YAITU PRODUKSI KERIPIK SINGKONG DAN KERIPIK PISANG	JL. TENGAH TANJUNGPANDAN – MANGGAR DESA AIR MADU KEC. SIMPANG RENGGIANG KAB. BELITUNG TIMUR, Provinsi Bangka Belitung	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
707	03-02-2023	H. JAWARNO KS, S.IP	Butuh banyak pendampingan oleh konsultan Plut KUKM terhadap UMKM yang sebarannya tidak merata antara di desa dan kota	Pegiat UKM di Desa Paya Benua belum memiliki kelompok/organisasi	Desa Paya Benua, Provinsi Bangka Belitung	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menganut prinsip *money follows program* dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan secara holistik, tematik, terintegratif, dan spasial dalam perencanaan pembangunan diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

- Holistik-Tematik: untuk mencapai sasaran prioritas nasional, perlu koordinasi multi kementerian/lembaga.
- Integratif: pencapaian sasaran prioritas nasional perlu dilakukan secara terintegrasi dari berbagai sektor pembangunan dan jenjang pemerintahan.
- Spasial: perlu sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 merupakan penjabaran tahun keempat dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama, oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia. Sampai dengan draft Rancangan Renja 2024 ini disusun Rancangan RKP 2024 mengangkat tema **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional (PN) ke dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas Nasional (ProPN). Program kegiatan Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah apabila dikaitkan dengan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas Nasional (ProPN) adalah:

- Prioritas Nasional (PN): Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif

- Program Prioritas (PP): Peningkatan nilai tambah jasa produktif
- Kegiatan Prioritas (KP): Pengembangan kemitraan usaha mikro dan kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)
- Proyek Prioritas Nasional (ProPN) yang disentuh adalah: perluasan kemitraan usaha, pengembangan kapasitas usaha, penguatan kapasitas kelembagaan kemitraan, penguatan ekosistem (regulasi, infrastruktur, investasi, & HAKI), pelaksanaan diklat vokasi, peningkatan promosi dan advokasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Melanjutkan tahun ke 2 masa pemerintahan transisi pejabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang pada tahun ke 1 (tahun 2023) dipimpin oleh Ridwan Djamaluddin selaku Pj Gubernur dan tahun 2024 akan berakhir pada 31 Maret 2023. Namun Sasaran pembangunan tahun 2024 yang terangkum dalam rancangan awal RKPD 2024 sudah selesai disusun dan telah disampaikan ke perangkat daerah untuk menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat daerah tahun 2024. Dalam kebijakan tersebut, diatur bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode 2023-2026 berpedoman pada RPJPD dengan kepala daerah ditunjuk oleh Pemerintah pusat sebagai pejabat kepala daerah terpilih dengan masa jabatan 2023-2024, sampai dengan pelantikan kepala daerah terpilih. Sesuai dengan RPJPD, maka pemerintah daerah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dengan visi **"Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju berwawasan Lingkungan, didukung oleh sumber daya manusia handal dan Pemerintah yang amanah menuju masyarakat sejahtera"** dan dengan 5 Misi yaitu :

1. Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis Agri-Bahari
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
3. Mewujudkan ketata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance)
4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Untuk tahun 2024, Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 mengangkat Tema **“Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Pengembangan Sdm Dan Stabilitas Demokrasi”** dengan prioritas pembangunan pada tahun 2024 adalah:

- I. Prioritas Pembangunan Utama
 1. Pembangunan Ekonomi
 2. Pembangunan Lingkungan
 3. Pembangunan SDM
 4. Pembangunan Demokrasi
- II. Prioritas Pembangunan Penunjang
 1. Pembangunan Wilayah
 2. Pemerataan Pendapatan Masyarakat
 3. Pembangunan Pemerintahan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah tahun 2024 difokuskan untuk mendukung prioritas pembangunan Utama ke-1 yaitu Pembangunan Ekonomi dan Prioritas Pembangunan Penunjang ke-2 yaitu Pemerataan Pendapatan Masyarakat, maka Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2024 ditargetkan untuk mencapai tujuan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni **“Meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, skala usaha dan kualitas SDM KUMKM serta peningkatan kesempatan kerja”**.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya **“meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, skala usaha dan kualitas SDM KUMKM serta peningkatan kesempatan kerja”** bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, secara spesifik menjabarkan langkah-langkah pencapaian tujuan menjadi beberapa opsi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan usaha kecil;
2. Meningkatkan pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi;
3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
4. Meningkatkan pemberdayaan Usaha Kecil, dan
5. Meningkatkan kinerja Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM

Secara lebih detail sasaran dari tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DKUKM) dengan indicator adalah: Predikat RB Perangkat Daerah (DKUKM) dan sasarannya adalah Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah (DKUKM) dengan indikator Nilai RB Perangkat Daerah (DKUKM)
2. Tujuan 2 : Meningkatkan pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerjadengan indicator adalah: 1. Persentase pertumbuhan koperasi; 2. Persentase pertumbuhan UKM; 3. Persentase SDM UKM dan koperasi yang berkualitas dan sasarannya adalah Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerja dengan indikator 1. Persentase pertumbuhan koperasi; 2. Persentase pertumbuhan UKM; 3. Persentase SDM UKM dan koperasi yang berkualitas

Hubungan antara visi-misi Kepala Daerah dan tujuan-sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Keterkaitan Visi-Misi Kepala Daerah dan Tujuan Sasaran
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Beserta Target Pada Renja Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	RKPD (BAPPEDA)				RENJA PD				
	UNIT : Sekretariat (Perencanaan)								
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi		Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DKUKM)	Predikat RB Perangkat Daerah (DKUKM)	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah (DKUKM)	Nilai RB Perangkat Daerah (DKUKM)
	UNIT : BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL								
2	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Masih belum optimalnya kontribusi Sektor koperasi dan UKM dalam perluasan kesempatan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	UNIT : BIDANG PENGEMBANGAN USAHA KECIL								

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	RKPD (BAPPEDA)				RENJA PD				
3	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka		Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	UNIT : Koperasi								
4	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka		Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	UNIT : UPTD BALATKOP UKM								
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	RKPD (BAPPEDA)				RENJA PD				
2	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka		Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Penciptaan Lapangan Kerja pada sektor Koperasi dan UKM	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

3.3. Dukungan Program dan Kegiatan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, selanjutnya dirumuskan Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2024 yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan daerah seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPD 2023-2026, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan di seluruh perangkat daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan. Selain itu penetapan program dan kegiatan perangkat daerah didasarkan RKP tahun 2023 dan kebijakan nasional seperti seperti capaian *Sustainable development goal's* (SDG's), Pengarusutamaan Gender, dimana setiap perangkat daerah harus mensertakan paling sedikit lima kegiatan daerah yang responsive gender, dukungan terhadap pengentasan kemiskinan dan juga inovasi daerah. Setiap perangkat daerah harus menyiapkan usulan minimal 2 inovasi daerah yang akan dikembangkan pada tahun 2023, dan harus masuk dalam kegiatan tahun 2023.

Daftar usulan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2024 yang mendukung Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan keselarasan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Program dan Kegiatan pada
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana	Target	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					23,633,051,862	APBD		23,980,206,480
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Dinas)	Nilai Sakip PD		81	persen	13,633,250,262	APBD	81,5	13,150,993,680
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi		13	Dok	95,000,000	APBD	13	100,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	Dok	70,000,000	APBD	6	75,000,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6	Dok	25,000,000	APBD	6	25,000,000
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal		854		11,746,668,976	APBD	868	12,841,555,362
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan		4 Dok		8,531,839,409	APBD		8,735,480,747

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana	Target	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		55	Org	8,531,839,409	APBD	55	8,735,480,747
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	survey kepuasan pelayanan kepegawaian (angka)		4 Dok	Dok	187,000,000	APBD		145,000,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		8	Org	130,000,000	APBD	8	145,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		97	org	57,000,000	APBD		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan		1	paket	1,050,683,200	APBD	1	1,255,212,933
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	paket	55,000,000	APBD	1	59,875,715
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	paket	135,164,300	APBD	1	59,895,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	paket	34,999,500	APBD	1	35,167,682
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1	paket	137,000,000	APBD	1	171,589,584

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana	Target	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1	paket	13,620,000	APBD	1	27,152,400
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1	paket	99,999,400	APBD	1	136,730,635
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	Lap	71,500,000	APBD	1	92,670,875
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	Lap	453,400,000	APBD	1	605,581,042
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	Dok	50,000,000	APBD	1	66,550,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang tersedia		1		1,210,000,000	APBD	1	280,000,000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	Paket	57,000,000	APBD		30,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan		17	unit	273,000,000	APBD		250,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2	Unit	880,000,000	APBD		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang yang tersedia		12		1,830,516,125	APBD	12	1,850,300,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana	Target	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	Lap	23,285,000	APBD	12	25,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	Lap	329,931,125	APBD	12	345,000,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	Lap	7,000,000	APBD	12	10,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13	Lap	1,470,300,000	APBD	13	1,470,300,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia		5		728,211,528	APBD	5	785,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6	Unit	65,000,000	APBD	6	85,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		3	Unit	107,780,000	APBD	3	120,000,000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		5	Unit	409,431,528	APBD	5	425,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana	Target	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		5	Unit	130,000,000	APBD	5	130,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		3	Unit	16,000,000	APBD	3	25,000,000
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam yang difasilitasi		3	%	60,000,000	APBD	5	85,000,000
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang difasilitasi		3	unit usaha	60,000,000	APBD	5	85,000,000
	Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam		3	koperasi	60,000,000	APBD	5	85,000,000
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa		22	%	135,000,000	APBD	27	245,000,000
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang di periksa dan diawasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		20	Koperasi	110,000,000	APBD	20	175,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana	Target	
	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat		20	Dok	35,000,000	APBD	20	75,000,000
	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel		20	Koperasi	75,000,000	APBD	20	100,000,000
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang di periksa dan diawasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		13	Koperasi	25,000,000	APBD	13	70,000,000
	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat		13	Koperasi	25,000,000	APBD	13	70,000,000
	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usip Koperasi	Persentase Kesehatan KSP/USP yang dinilai		12		90,000,000	APBD	15	150,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana	Target	
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		10	Koperasi	90,000,000	APBD	10	150,000,000
	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi		10	Koperasi	25,000,000	APBD	10	50,000,000
	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan		3	Koperasi	65,000,000	APBD	3	100,000,000
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi, UKM yang bersertifikat		95	persen	3,824,212,800	APBD	95	3,849,212,800
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang terlatih		50	org	75,000,000	APBD	50	100,000,000
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang memahami pengetahuan perkoperasian		50	org	75,000,000	APBD	50	100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana	Target	
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah SDM UKM yang terlatih		200	org	3,749,212,800	APBD	200	3,749,212,800
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM UKM yang meningkat Pengetahuan kapasitas dan kompetensi		200	org	3,749,212,800	APBD	200	3,749,212,800
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang diberdayakan		7		1,312,239,600	APBD	11	1,575,000,000
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		7	koperasi	1,312,239,600	APBD	8	1,575,000,000
	Sub Kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha		7	koperasi	200,000,000	APBD	8	225,000,000
	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan restrukturisasi Usaha		7	koperasi	1,042,239,600	APBD	8	1,250,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana	Target	
	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		70	keluarga	70,000,000	APBD	100	100,000,000
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase UMKM yang Diberdayakan		0,51%		2,379,622,100	APBD	0,62%	2,600,000,000
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pemutakhiran data dan penguatan kelembagaan UMKM		1	Dok	2,379,622,100	APBD	1	2,600,000,000
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		700	unit usaha	619,443,000	APBD	700	750,000,000
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan		840	org	1,760,179,100	APBD	840	1,850,000,000
	Program Pengembangan Umkm	Persentase Usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah		11	%	2,198,727,100	APBD	13	2,325,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber dana	Target	
	Kegiatan Pengembangan Usaha kecil dengan Orientasi Peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah	Jumlah Usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah		4	Usaha	2,198,727,100	APBD	6	2,325,000,000
	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		462	Unit usaha	1,881,584,200	APBD	420	1,950,000,000
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara Bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum		150	Org	317,142,900	APBD	170	375,000,000

3.4. Dukungan Program dan kegiatan pada Kebijakan Nasional

Di Samping melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Koperasi dan UKM juga perlu memberi dukungan dan kontribusi terhadap capaian Nasional seperti Pengentasan Kemiskinan, Penurunan angka pengangguran, Pengendalian Inflasi, Sustainable Developmen Goal's (SDG's), Pengarusutamaan Gender dan Kebijakan Prioritas pembangunan Nasional Lainnya.

1. Pengentasan Kemiskinan Ekstrim

Memperhatikan Intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrim, dimana urusan koperasi dan UMKM menjadi salah satu sector yang berkontribusi dan terlibat dalam pengentasan Kemiskinan Ekstrim. Keterlibatan Dinas Koperasi dan UKM dalam pengentasan Kemiskinan ekstrim sifatnya hanya penunjang atau supporting, sehingga dalam melaksanakan program dan kegiatan selalu berkoordinasi dengan Bappeda sebagai kordinator baik dari aspek perencanaan yang sinkron dengan sasaran RPD, maupun dari aspek pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan yang sesuai dengan yang telah ditentukan.

Tabel 3.3.

Strategi, Program dan Kegiatan yang mendukung Pengentasan kemiskinan Ekstrim
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

No	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Ket
1	Meningkatkan omset Koperasi dan UKM	Program Pengembangan UKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Sub Kegiatan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain Dan Teknologi	1,185,766,900	
				Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	319,509,300	
		Program Pemberdayaan UMKM	Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku kepentingan	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	699,985,500	

No	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Ket	
2	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UKM	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjamkoperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu)Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	100,000,000		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas DaerahKabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	35,999,700		
3	Meningkatkan jumlah Koperasi dan UKM yang mendapatkan akses pembiayaan	Program Pengembangan UKM	KegiatanPengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usahamenjadi Usaha Menengah	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil	218,062,500		
4	Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi produksi KUKM	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintasdaerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)Daerah Provinsi	88,249,900		
				Sub Kegiatan Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	173,999,700		
					Sub Kegiatan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	13,000,000	
					Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	65,800,000	
TOTAL					2,900,373,500		

2. Penurunan Angka Pengangguran

Berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, dimana tujuan Renstra tahun 2024 adalah Meningkatkan pertumbuhan Koperasi dan UKM untuk Penciptaan Lapangan Kerja dengan mendukung Tujuan Pembangunan Daerah seperti yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 adalah Meningkatnya Angkatan Kerja dengan Indikator Tingkat Pengangguran terbuka.

Tabel 3.4.

Strategi, Program dan Kegiatan yang mendukung Penurunan Angka Pengangguran
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

No	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Ket
1	Meningkatkan kualitas SDM KUKM melalui pelatihan dan sistem online	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Kegiatan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintasdaerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	3,433,198,192	
			Program Pengembangan UKM	KegiatanPengembang an Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usahamenjadi Usaha Menengah	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	43,999,700
		Program Pemberdayaan UMKM			Sub Kegiatan Fasilitas Inkubator Usaha Kecil	179,905,700
			Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku kepentingan	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM danKewirausahaan	215,490,300	
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM danKewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	130,624,200	
				Sub Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	70,262,200	
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintasdaerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	35,399,500
		TOTAL				4.108.879.792

3. Pengendalian Inflasi

Inflasi merupakan salah satu factor penghambat pertumbuhan perekonomian, karena dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan menurunnya omzet pelaku usaha, sehingga Pemerintah sangat memperhatikan pergerakan dan fluktuasi inflasi. Pemerintah daerah diwajibkan untuk membentuk Tim pengendali inflasi yang terdiri dari unsure Pemerintah, Perbankan, Filantropi, media masa, dan akademisi yang bertugas memantau dan mengevaluasi pergerakan inflasi yang terjadi setiap Bulan. Adapun dukungan dari Program Dinas Koperasi dan UKM dalam upaya untuk pengendalian inflasi, dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5.
Strategi, Program dan Kegiatan yang mendukung Pengendalian Inflasi
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

No	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Ket
1	Meningkatkan omset Koperasi dan UKM	Program Pengembangan UKM	KegiatanPengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usahamenjadi Usaha Menengah	Sub Kegiatan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain Dan Teknologi	1,185,766,900	
				Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	319,509,300	
2	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UKM	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjamkoperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu)Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	35,999,700	
3	Meningkatkan jumlah Koperasi dan UKM yang mendapatkan akses pembiayaan	Program Pengembangan UKM	KegiatanPengembangana Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usahamenjadi Usaha Menengah	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil	218,062,500	
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintasdaerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)Daerah Provinsi	88,249,900	
TOTAL					1,847,588,300	

4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Berpedoman pada Pepres Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) 2025-2035 sebagai manifestasi dari dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Untuk mencapai target yang telah disepakati dalam agenda tersebut, Pemerintah melalui Pepres No 111 Tahun 2022 mengharapkan Pemerintah Daerah dapat mendukung capaian tersebut. Untuk Urusan Koperasi dan UKM yang menjadi tupoksi Dinas Koperasi dan UKM tergabung dalam Pilar Ekonomi pada Goal 8 yaitu : Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan dengan Indikator 1. Persentase Akses UMKM ke layanan keuangan; 2. Proporsi Kredit UMKM terhadap total kredit. Untuk mendukung capaian ini, berikut ini strategi dan program yang akan dilaksanakan:

Tabel 3.6.

Strategi, Program dan Kegiatan yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

No	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Ket
1	Meningkatkan jumlah Koperasi dan UKM yang mendapatkan akses pembiayaan	Program Pengembangan UKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil	218,062,500	
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	88,249,900	
2	Meningkatkan kualitas SDM KUKM melalui pelatihan dan sistem online	Program Pemberdayaan UMKM	Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku kepentingan	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	215,490,300	

No	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Ket
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM danKewirausaha an melalui Pendidikan dan Pelatihan	130,624,200	
TOTAL					652,426,900	

Disamping program dan Kegiatan dari pemerintah daerah di atas, ada juga kontribusi yang diberikan oleh stake holder seperti BUMN, Filantropi, termasuk PT Timah, Perbankan (BI, BRI, BNI dan Mandiri) yang memberi kredit usaha Rakyat (KUR) dan juga dari lembaga social seperti Baznaz, Muhammadiyah dan lainnya, yang belum terdata.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sasaran utama dalam upaya meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, skala usaha dan kualitas SDM KUMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dengan meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan usaha kecil, meningkatkan pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi, meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, meningkatkan pemberdayaan Usaha Kecil, dan meningkatkan kinerja Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM. Kelima sasaran ini didukung oleh 6 program yang kemudian diimplementasikan dalam beberapa kegiatan dan beberapa pekerjaan. Outcome program yang direncanakan merupakan target yang harus dicapai oleh masing-masing bidang pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang akan mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan uraian kegiatan secara rinci yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan :

- 1) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan:

- 1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 2) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kegiatan:

- 1) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan:

- 1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 2) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan:

- 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan:

- 1) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

8. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan:

- 1) Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

Tabel 4.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Koperasi dan UKM

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana
-1	-2	-3		-4	-5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			20,549,417,269	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (DINAS)			14,200,283,067	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah			70,000,000	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	50,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	6	Dokumen	20,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana
-1	-2	-3		-4	-5
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9,196,121,566	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang	9,196,121,566	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			135,014,200	APBD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5	Orang	54,964,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	97	Orang	80,050,200	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,076,212,395	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	47,169,994	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	65072363	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Paket	23081382	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	128,963,416	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	paket	12,890,000	
	Penyediaan Bahan/Material	1	Paket	180,065,240	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	71,550,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	497,420,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	50,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,140,912,156	APBD
	Pengadaan Mebel	1	Paket	35,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15	Unit	130,912,156	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Unit	975,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,800,016,750	APBD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana
-1	-2	-3		-4	-5
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	19,285,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	272,731,750	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13	laporan	1,508,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			782,006,000	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	Unit	148,290,000	
	Pemeliharaan Mebel	5	Unit	15,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	Unit	392,556,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	Unit	101,160,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	125,000,000	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPT BALKOP)			192,246,483	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT Balkop)			124,546,633	APBD
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	5,000,000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	46,546,633	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	bulan	10,000,000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	2,000,000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	dokumen	1,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana
-1	-2	-3		-4	-5
6	Penyediaan Bahan/Material	1	Paket	25,000,000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	laporan	35,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	APBD
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Unit	0	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			67,699,850	APBD
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	4,000,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	57,199,850	
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	13	Laporan	6,500,000	
3	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam			150,000,000	APBD
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2	ijin usaha	150,000,000	
	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2	Koperasi	150,000,000	
4	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			275,000,000	APBD
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20	Koperasi	250,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana
-1	-2	-3		-4	-5
	Sub Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	20	Dokumen	100,000,000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20	Koperasi	150,000,000	
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	13	KSP	25,000,000	
	Sub Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	13	koperasi	25,000,000	
5	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			150,000,000	APBD
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10	jenis	150,000,000	
	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	10	koperasi	75,000,000	
	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	3	koperasi	75,000,000	
6	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			275,000,000	APBD
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	50	orang	275,000,000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	50	orang	275,000,000	
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			690,000,000	APBD
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5	Koperasi	690,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target		Pagu Indikatif	Sumber Dana
-1	-2	-3		-4	-5
	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	5	Unit Usaha	340,000,000	
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	5	Unit Usaha	200,000,000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	5	Keluarga	150,000,000	
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			2,558,016,353	APBD
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1	Dokumen Pemutakhiran Data UMKM	2,558,016,353	
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	180.184	Unit	895,001,800	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	840	Orang	1,663,014,553	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			2,058,871,366	APBD
	Kegiatan Pengembangan Usaha kecil dengan Orientasi Peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah	3	unit	2,058,871,366	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	420	Unit Usaha	1,143,871,366	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	140	Orang	915,000,000	

BAB V

PENUTUP

5.1. Penutup

Pada tahun 2024 tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah "Penguatan Perekonomian, SDM Dan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pemanfaatan Sumberdaya Dengan Cerdas Dan Berwawasan Lingkungan"

dengan 5 Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu:

1. Penguatan dan peningkatan perekonomian daerah;
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM;
3. Peningkatkan partisipasi publik dan Tatakelola Pemerintahan;
4. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat; dan
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam.

Dari kelima prioritas pembangunan daerah ini, ada 2 prioritas pembangunan daerah yang berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, yaitu Penguatan dan peningkatan perekonomian daerah, dan Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis baik dengan Kementerian/Lembaga Teknis Terkait, Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 secara efektif dan efisien. Selain itu Renja ini dijadikan sebagai salah satu bahan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD tahun 2024.

Untuk mendukung realisasi 5 prioritas pembangunan daerah yang berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah tersebut diatas pada tahun anggaran 2024, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki 7 program prioritas yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
8. Program Pengembangan UMKM

Ketujuh program prioritas tersebut memiliki beberapa indikator dan target yang telah disepakati dan ditetapkan harus dilaksanakan sehingga dibutuhkan dukungan dari sisi penganggaran agar prioritas pembangunan daerah dapat tercapai.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023;
2. Memperhatikan masalah yang dihadapi pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 dan tahun 2023;
3. Memperhatikan sumber daya yang dimiliki dan yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
4. Memperhatikan sasaran, tujuan dan target dari tiap indikator yang telah ditetapkan dan yang harus dicapai;
5. Memperhatikan keberlanjutan Program (*sustainable development*) yang terdapat pada Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selama lima tahun, untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk memantau dan memonitoring ketercapaian target yang telah ditetapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan maka diperlukan Pengendalian dan evaluasi (dalev) secara konsisten setiap triwulan tahun berjalan terhadap Rencana Kerja terkait kegiatan, target kinerja, anggaran dan permasalahan yang dihadapi untuk menentukan rencana tindak lanjut sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kinerja program kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai target dan harapan.

Pangkalpinang, April 2023

Kepala Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Drs. H. Yulizar Adnan, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19630717 198903 1 009